BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan perhitungan statistik dan pengujian hipotesis. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Penelitian dalam penulisan skripsi ini pada 13 dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Dimana responden penelitian adalah berjumlah 43 orang, dengan 13 orang kepala dinas dan 29 orang pegawai dinas SKPD Kabupaten Ciamis.

4.1.1 Gambaran Umum Dinas SKPD Kabupaten Ciamis

4.1.1.1 Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36 kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa, selama periode 2007 – 2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun

Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah PNS di Ciamis mengalami peningkatan dari 18.404 orang pada tahun 2008 menjadi 18.966 orang pada tahun 2009 Berdasarkan komposisi pegawai menurut jeniskelamin, selama tahun 2007 - 2009 rata-rata jumlah pegawai laki-laki meningkat sebesar 1,37 persen sedangkan pegawai perempuan sebesar6,47 persen.

Selanjutnya data yang ada juga menunjukkan adanya penurunan kualitas PNS dari sisi pendidikan yaitu semakin banyaknya jumlah pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah, sementara jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) semakin berkurang, hal ini disebabkan adanya pengangkatan pegawai honorer yang bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan tingkat pendidikan yang rata-rata memiliki pendidikan di bawah SMA.

Peta perpolitikan Kabupaten Ciamis hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2009 menunjukan dominasi PDI-P di parlemen (DPRD) yang diikuti oleh Demokrat dan Golkar. Jumlah anggota DPRD yang berasal dari PDI-P sebanyak 11 orang lebih dari seperlima dari total anggota DPRD Ciamis. Jumlah terbanyak kedua dan ketiga ditempati Partai Demokrat dan Partai Golkar dengan jumlah perolehan kursi masing-masing sebanyak 9 dan 8. Partai Demokrat merupakan partai politik yang fenomenal, apabila dibandingkan dengan PEMILU sebelumnya partai politik ini secara perlahan dan pasti mengalami lonjakan jumlah perolehan kursi di Parlemen(DPRD) Kabupaten Ciamis di mana pada PEMILU tahun 2004

hanya menempatkan 1 kursi (2,22 %) sedangkan pada tahun 2009 melonjak menjadi 9 kursi (18,00 %), dan yang paling mengejutkan yaitu perolehan kursi untuk Partai GOLKAR dimana pada PEMILU sebelumnya memperoleh 14 kursi (31,11 %) berkurang menjadi 8 kursi(16,00 %).

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 menghabiskan anggaran hampir 1,348 triliun rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD Kabupaten Ciamis. Jumlah ini meningkat sebesar 15,91 persen dari APBD pada 2007. Dari total APBD Kabupaten Ciamis sebesar 1,348 triliun, PAD hanya menyumbang sebesar 0,051 triliun atau sekitar 3,84%, sementara DAU menyumbang sekitar 1,05 triliun rupiah atau sekitar 63,81%, dengan demikian pembiayaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis masih tergantung dari DAU.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

- Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut : “ Dengan Iman dan Taqwa Ciamis MANTAP Sejahtera Tahun 2014”.

Pengertian Iman dan Taqwa mengandung makna, bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT harus melandasi dan menjiwai para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis. Sedangkan kata MANTAP mengandung makna, bahwa dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis akan dilakukan penguatan dan pemantapan hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 yang memberikan prioritas terhadap pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis dan pariwisata, tetap dilanjutkan melalui penguatan dan pemantapan sektor tersebut, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah dan masyarakat. Kata MANTAP juga merupakan kepanjangan kata dari Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Produktif, sebuah cita-cita mewujudkan Kabupaten Ciamis menjadi daerah yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila terciptanya rasa aman, lingkungan hidup yang nyaman dan lestari, serta sumber daya manusia yang amanah, produktif dan berdaya saing, sehingga mencapai ketangguhan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Adapun makna Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

- Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis adalah:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Utusan-Nya.

2. Meningkatkan sumber daya yang berakhlak mulia, amanah, produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan lokal.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.

Adapun tujuan dan sasaran setiap Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Utusan-Nya .

   Tujuan :

   a. Meningkatnya pemahaman keimanan yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar

   b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan secara benar dan baik

   Sasaran :

   - Meningkatnya pengetahuan mengenai keimanan secara lurus terhindar dari noda-noda syirik.
   - Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk ibadah secara benar dan baik.

2) Teraplikasikannya nilai-nilai akhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, amanah dan berakhlak mulia

   Tujuan : Meningkatnya kapasitas SDM yang memiliki keunggulan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas hidup

   Sasaran :

   - Meningkatnya kualitas dan kesempatan pendidikan.
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB).
   - Meningkatnya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
   - Meningkatnya kualitas pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan dan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama.
   - Terpeliharanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Tujuan : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

   Sasaran :

   - Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah untuk terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
   - Tersedianya sarana, prasarana dan aparatur yang memadai.
   - Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).

- Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan anggaran. Teciptanya basis data daerah yang akurat, relefan dan lengkap.
- Terciptanya sinergitas pembangunan daerah.
- Terciptanya sinergitas pembangunan kewilayahan.

4) Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan local

Tujuan : Meningkatkan daya beli, pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas, kuantitas, pengelolaan dan pemasaran produk unggulan daerah.
- Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pengembangan perekonomian rakyat
- Terjaminnya Ketersediaan, mutu, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat.
- Meningkatnya pertumbuhan Investasi.
- Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal.

5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa

Tujuan : Mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa

Sasaran :

- Meningkatnya kesetaraan Gender, peran pemuda dan prestasi olah raga.
- Menurunnya Tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar desa (desa tertinggal, desa perbatasan, desa sekitar hutan dan perkebunan).

6) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
   Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
   Sasaran :
   - Terjaminnya ketersediaan Sumberdaya alam dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
   - Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
   - Terwujudnya penataan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan
   - Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bencana.
7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.
   Tujuan : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya
   Sasaran :
   - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung kelancaran pergerakan orang, barang dan jasa.
   - Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan kelistrikan serta telekomunikasi.

- Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan.
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas irigasi untuk menunjang ketahanan pangan.
- Meningkatnya kenyaman wisatawan.
- Terciptanya sinergitas pembangunan infrastruktur wilayah dan perdesaan.
- Terlaksananya percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- Meningkatnya penataan permukiman dan ruang.

4.1.1.2 Dinas- Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Adapun dinas- dinas pemerintah Daerah kabupaten Ciamis terdiri dari 13 dinas, yaitu:

1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keratif
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral

12. Dinas Peternakan

13. Dinas Pendidikan

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No 17 tentang organisasi Perangkat daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

   1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
   2. Sub Bagian Keuangan
   3. Sub Bagian Program

c. Bidang- bidang organisasi.

4.1.1.4 Tugas Dinas Pemerintah Kabupaten Camis

Menurut Perda Nomor 17 tentang organisasi Perangkat daerah Kabupaten Ciamis, "Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2 Hasil Pengolahan Data

4.1.2.1 Analisis Karakteristik Responden

Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, kepada 13 orang kepala dinas SKPD Kabupaten Ciamis, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Responden	Persentase
1	Pria	30	71%

2	Wanita	12	28%
Jumlah		**42**	**100%**

Sumber: Data kuesioner, 2015

Tabel 4.2
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
1.	SMU	-	-
2.	Akademi	-	-
3.	Sarjana/S1	35	83%
4.	Master/S2	7	17%
5.	Doktor/S3	-	-
6.	Lain-lain	-	-
Jumlah		**42**	**100%**

Sumber: Data kuesioner, 2015

Tabel 4.3
Komposisi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
1.	≤ 5 tahun	-	-
2.	6-10 tahun	15	35%
3.	11-15 tahun	15	35%
4.	16-20 tahun	12	30%
5.	> 20 tahun	-	-
Jumlah		**42**	**100%**

Sumber: kuesioner, 2015

4.1.2.2 Deskripsi Tanggapan Responden

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa variabel X1 (*good governance*) memiliki 10 indikator yang terdiri dari 18 item pernyataan:

- Partisipasi :1 Pernyataan
- Penegakan hukum : 1 Pernyataan
- Transparansi : 1 Pernyataan
- Kesetaraan : 1 Pernyataan
- Daya tanggap : 1 Pernyataan
- Wawasan ke depan : 1 Pernyataan
- Akuntabilitas : 1 Pernyataan
- Pengawasan : 1 Pernyataan

- Efesiensi & Efektifitas: 1 Pernyataam
- Profesionalisme : 1 Pernyataan

Sedangan variabel X2 (Akuntabilitas) memiliki 3 indikator dengan 6 item pernyataan :

- Akuntabilitas keuangan : 2 Pernyataan
- Akuntabilitas Manfaat : 2 Pernyataan
- Akuntabilitas prosedural : 2 Pernyataan

`Untuk variabel Y (Kinerja Instansi Pemerintah) memiliki 3 indikator dengan 4 item pernyataan:

- Efektivitas : 2 Pernyataan
- Pertumbuhan Karyawan : 2 Pernyataan
- Kepuasan Pelanggan : 2 Pernyataan

4.1.3 Hasil Pengujian Data

4.1.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji validitas setiap item pertanyaan dalam mengukur variabelnya. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Nilai korelasi minimum untuk item yang dianggap valid adalah sebesar 0,3. Jadi jika skor total kurang dari 0,3 makan item dalam instrument tersebut tidak valid. Berikut hasil uji validitas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas X1 *(Good government governance)*

NO ITEM PERNYATAAN	*r hitung*	*r kritis*	Keterangan
1	0,363	0,3	Valid
2	0,667	0,3	Valid
3	0,632	0,3	Valid
4	0,755	0,3	Valid
5	0,762	0,3	Valid
6	0,367	0,3	Valid
7	0,638	0,3	Valid
8	0,331	0,3	Valid
9	0,694	0,3	Valid
10	0,586	0,3	Valid

Hasil uji validitas yang di peroleh untuk kuesioner variabel *good governance* (X1), seperti terlihat pada tabel 4.7, memperlihatkan bahwa nilai korelasi (r) untuk skor item dengan total skor variabel *Good government governance* berada di atas 0,3 maka semua item valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas X2 (Akuntabilitas)

NO ITEM PERNYATAAN	*r hitung*	*r kritis*	Keterangan
1	0,550	0,3	Valid
2	0,738	0,3	Valid
3	0,674	0,3	valid
4	0,442	0,3	Valid
5	0,616	0,3	Valid
6	0,756	0,3	valid

Hasil uji validitas yang diperoleh untuk kuesioner variabel Akuntabilitas (X2) dalam tabel 4.8, memperlihatkan bahwa nilai korelasi (r) untuk skor item dengan total skor variabel Akuntabilitas berada di atas 0,3 maka semua item valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Y (Kinerja Instansi Pemerintah)

NO ITEM			

PERNYATAAN	*r hitung*	*r kritis*	Keterangan
1	0,681	0,3	Valid
2	0,678	0,3	Valid
5	0,469	0,3	Valid
6	0,688	0,3	Valid
7	0,775	0,3	Valid
8	0,782	0,3	Valid

Hasil uji validitas yang di peroleh untuk kuesioner variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y), seperti terlihat pada tabel 4.9, memperlihatkan bahwa nilai korelasi (r) untuk skor item dengan total skor variabel *Good government governance* berada di atas 0,3 maka semua item valid. Untuk itu semua item kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

4.1.3.2 Uji Realibilitas

Pengujian relibilitas dengan koefisien *Split Half* digunakan untuk mengetahui keandalan kuesioner sebagai alat ukur. Hasil yang dapat diterima oleh koefisien positif jika nilai realibilitas di atas 0,7. Berikut hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	Standar Minimum	Keterangan
Good government governance (X1)	**0,819**	**0,7**	**Reliabel**
Akuntabilitas (X2)	**0,700**	**0,7**	**Reliabel**
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	**0,702**	**0,7**	**Reliabel**

Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan sudah reliabel karena nilai reliabilitas kuesioner di atas 0,7.

4.1.4 Analisi Deskriptif

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Untuk memudahkan interpretasi data variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden berdasarkan persentase skor jawaban responden dan diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum dan skor minimum.

4.1.4.1 Analisis Deskriptif *Good government governance* (X_1)

Variabel *Good government governance* diukur dengan 10 indikator , yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi & efektifitas dan profesionalisme. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Berdasarkan data dari penelitian, diperoleh skor penilaian dari responden untuk 10 indikator *good governance* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel GGG (X1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Partisipasi	169	210	80,47%	Baik
2	Penegakan hukum	128	210	60,95%	Cukup Baik
3	Transparansi,	151	210	71,90%	Baik
4	Kesetaraan	144	210	68,57%	Baik
5	Daya tanggap	139	210	66,19%	Cukup Baik
6	Wawasan ke Depan	143	210	68,09%	Baik
7	Akuntabilitas	141	210	67,14%	Cukup Baik
8	Pengawasan	140	210	66,67%	Cukup Baik
9	Efisien dan Efektivitas	135	210	64,28%	Cukup Baik
10	Profesionalisme	133	210	63,33%	Cukup Baik

	Total	**1.423**	**2.100**	**67,76%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada variabel *good governance* sebesar **69,41**% yaitu berada pada interval 68.00% - 84.00%. *Good governance* secara umum masuk dalam kategori baik. Semua indikator yang di teliti menampakan hasil yang baik.

Hasil tanggapan responden mengenai *Good governance* untuk sepuluh indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. Partisipasi

Pada indikator partisipasi ini, digunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Hasil tanggapan responden untuk indikator partisipasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator partisipasi

No	**Pernyataan**		**Alternatif Jawaban**					**Skor**
			5	**4**	**3**	**2**	**1**	
1	Masyarakat di kabupaten Ciamis memberi masukan dan peduli terhadap pembangunan daerah Kabupaten Ciamis.	F	13	18	10	1	0	169
		%	31	43	24	2	0	100%
Total		F	13	18	10	1	0	169

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator partisipasi dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{169}{42x5x1}$x 100 % = 80,47%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor tanggapan responden sebesar 80,47%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori baik (berada pada interval 68.01% - 84.01%). Dari hasil yang di peroleh mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah kabupaten Ciamis memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk turut aktif memberikan dukungan dan partisipasi atas setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Ciamis. Sehinga pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di kabupaten Ciamis.

2. Penegakan hukum

Dalam mengukur indikator penegakan hukum ini, digunakan 1 item pertanyaan kuesioner. Kemudian hasil tanggapan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penegakan hukum

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Penegakan hukum di Kabupaten Ciamis adil bagi semua pihak tanpa pengecualian.	F	1	8	25	8	0	128
		%	2	19	60	19	0	100%
Total		F	1	8	25	8	0	128

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator penegakan hukum dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{128}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 60{,}95\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor tanggapan responden sebesar 60,95%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Dari nilai yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa lembaga penegakan hukum di Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis telah dijalankan dengan baik sesuai undang-undang yang di tetapkan. Penegakan hukumnya pun tidak pandang bulu, dalam artian penegakan hukum di Kabupaten Ciamis berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali.

3. Transparansi

Untuk mengukur indikator transparansi peneliti menggunakan 1 item kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Transparansi

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memberikan kemudahan dalam memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas.	F	7	15	17	2	1	151
		%	17	36	40	5	2	100%
Total		F	7	15	17	2	1	151

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator transparansi dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{151}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 71{,}90\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 71,90%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori baik (berada pada interval 68.01% - 84.01%). Jika dikaji lebih dalam, nilai yang diperoleh mengandung pengertian bahwa prinsip keterbukaan di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan baik. Masyarakat di Kabupaten ciamis dapat dengan mudah menerima informasi dan komunikasi yang diperlukan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

4. Kesetaraan

Untuk mengukur indikator kesetaraan peneliti menggunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kesetaraan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan, dengan komitmen politik terhadap penegakan dan perlindungan HAM.	F	4	15	19	3	1	144
		%	10	36	45	7	2	100%
Total		F	4	15	19	3	1	144

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator kesetaraan dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{144}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 68{,}57\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 68,57%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori baik (berada pada interval 68.01% - 84.01%). Dari hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memberikan telah memberikan kesetaraan, baik dalam pemberian informasi maupun komunikasi kepada masyarakat luas.

5. Daya tanggap

Untuk mengukur indikator daya tanggap peneliti menggunakan 1 item kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Daya Tanggap

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Fasilitas komunikasi, kotak saran dan layanan hotline sebagai akomodasi untuk menerima aspirasi masyarakat	F	2	16	19	3	2	139
		%	5	38	45	7	5	100%
Total		F	2	16	19	3	2	139

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator daya tanggap dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{139}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 66{,}19\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 66,19%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01% - 68,00%). Dari hasil yang diperoleh ini mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis cukup baik dalam menangani masalah yang muncul di dalam masyarakat dan dapat memberikan solusi yang baik dalam penanganannya.

6. Wawasan ke depan

Dalam indikator wawasan ke depan, digunakan 1 item pernyataan kepada responden. Berikut hasil tanggapan responden:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Wawasan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.	F	2	17	19	4	0	143
		%	5	40	45	10	0	100%
Total		F	2	17	19	4	0	143

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator wawasan ke depan dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{143}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 68{,}09\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 68,09%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori baik (berada pada interval 68.01% - 84.01%). Dari perolehan data tersebut, mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melakukan tugas dan kebijakannya sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dibuat.

7. Akuntabilitas

Untuk mengukur indikator akuntabilitas peneliti menggunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Sistem pemantauan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja.	F	2	15	21	4	0	141
		%	5	36	50	9	0	100%
Total		F	2	15	21	4	0	141

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator akuntabilitas dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{141}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 67{,}61\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 67,61%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01 - 68,00%). Dari hasil yang di peroleh, mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan akuntabillitas dengan cukup baik. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melakukan sistem pemantauan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dijalankan.

8. Pengawasan

Untuk mengukur indikator pengawasan peneliti menggunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengawasan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Masyarakat di kabupaten Ciamis memberi masukan terhadap penyimpangan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah.	F	4	13	18	7	0	140
		%	10	31	43	16	0	100%
Total		F	4	13	18	7	0	140

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator pengawasan dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{140}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 66{,}67\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 66,67%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

9. Efesiensi & Efektifitas

Untuk mengukur indikator efisiensi dan efektivitas, peneliti menggunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Efisiensi dan Efektivitas

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Biaya operasional pelayanan digunakan dengan efektif dan efisien.	F	2	9	27	4	0	135
		%	5	21	64	10	0	100%
Total		F	2	9	27	4	0	135

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{135}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 64{,}28\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 64,28%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Dari hasil ini mengandung pengertian, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cukup baik, dan sumber daya yang ada dapat digunakan dengan cukup efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

10. Profesionalisme

Untuk mengukur indikator profesionalisme, peneliti menggunakan 1 item pernyataan kuesioner kepada responden. Untuk hasil penilaian dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Profesional

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Kemampuan dan pengetahuan penyelenggara pemerintah penting dalam pemberian layanan.	F	2	10	23	7	0	133
		%	5	24	55	16	0	100%
Total		F	2	10	23	7	0	133

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Dari jumlah skor jawaban responden, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk indikator profesional dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{133}{42x5x1} \text{x } 100\ \% = 63{,}33\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase skor aktual dari tanggapan responden sebesar 63,33%. Nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Dari hasil jawaban responden yang diperoleh, ini berarti pengetahuan dan kemampuan penting dimiliki oleh pegawai pemerintah berpengaruh terhadap kinerja atau pemerian layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pegawai pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

4.1.4.2 Analisis Deskriptif Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas diukur dengan 3 indikator, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Berdasarkan data dari penelitian, diperoleh skor penilaian dari responden untuk 3 indikator akuntabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Akuntabilitas(X2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Akuntabilitas Keuangan	**246**	420	58,57%	Cukup Baik

2	Akuntabilitas Manfaat	240	420	57,14%	Cukup Baik
3	Akuntabilitas Prosedural	250	420	59,52%	Cukup Baik
	Total	**736**	**1.260**	**58,41%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Pada tabel 4.20 diatas dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada variabel akuntabilitas sebesar 58**,41**% yaitu berada pada interval 52.01% - 68.00%. Akuntabilitas secara umum masuk dalam kategori cukup baik.

Hasil tanggapan responden mengenai Akuntabilitas untuk ketiga indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mengukur indikator akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini digunakan 2 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Keuangan

No	**Pernyataan**		**Alternatif Jawaban**					**Skor**
			5	**4**	**3**	**2**	**1**	
1	Sumber dana yang digunakan diungkapkan dengan transparan kepada publik.	F	0	6	22	13	1	117
		%	0	15	52	31	2	100%
2	Sumber dana digunakan sesuai dengan mematuhi perundang-undangan.	F	1	10	22	9	0	52
		%	2	24	52	22	0	100%
Total		F	1	16	44	22	1	**246**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.21 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden

terhadap skor ideal untuk Indikator akuntabilitas keuangan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{246}{42x5x2}$x 100 % = 58,57%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator akuntabilitas keuangan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 58,57%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa penggunaan dana di pemerintah daerah kabupaten Ciamis telah diungkapkan dan dilaporkan dengan transparan kepada publik dan mematuhi undang-undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas Manfaat

Untuk mengukur indikator akuntabilitas manfaat dalam penelitian ini digunakan 2 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Manfaat

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Kegiatan atau program yang dilaksanakan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.	F	0	10	21	11	0	125
		%	0	24	50	26	0	100%
2	Hasil kegiatan yang dilaksanakan dilaporkan kepada masyarakat.	F	0	5	21	16	0	115
		%	0	12	50	38	0	100%
Total		F	0	15	42	27	0	**240**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.22 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator akuntabilitas manfaat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{240}{42x5x2}$x 100 % = 57,14%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator akuntabilitas manfaat berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 57,14%. Nilai yang diperoleh masuk kategori Sangat Baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa kegiatan atau program yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Ciamis cukup baik dan cukup bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan hasil kegiatan di laporkan kepada publik.

3. Akuntabilitas Prosedural

Untuk mengukur indikator akuntabilitas prosedural dalam penelitian ini digunakan 2 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Prosedur

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Pemerintah daerah menetapkan proses kebijakan dalam melakukan kinerja.	F	0	5	29	8	0	123
		%	0	12	69	19	0	100%
2	Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.	F	0	9	25	8	0	127
		%	0	21	60	19	0	100%
Total		F	0	14	54	16	0	**250**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.21 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator akuntabilitas prosedural menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{250}{42x5x2}$x 100 % = 59,52%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator akuntabilitas prosedural berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 59,42%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah sudah menetapkan proses kebijakan dan program atau kebijakan tersebut telah di jalankan oleh Pemerintah daerah kabupaten Ciamis dengan cukup baik sesuai prosedur yang berlaku.

4.1.4.3 Analisis Deskriptif Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel kinerja instansi pemerintah diukur dengan 3 indikator, yaitu efektivitas, pertumbuhan karyawan dan kepuasan pelanggan. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Berdasarkan data dari penelitian, diperoleh skor penilaian dari responden untuk 3 indikator kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Efektivitas	245	420	58,33%	Cukup Baik

2	Pertumbuhan Karyawan	236	420	56,19%	Cukup Baik
3	Kepuasan Pelanggan	207	420	49,28%	Kurang Baik
	Total	**688**	**1.260**	**54,60%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Pada tabel 4.22 diatas dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden pada variabel kinerja instansi pemerintah sebesar 54**,60**% yaitu berada pada interval 52.01% - 68.00%. Kinerja instansi pemerintah secara umum masuk dalam kategori cukup baik. Namun dalam indikator kepuasan pelanggan, belum menampakkan hasil yang baik.

Hasil tanggapan responden mengenai Kinerja Instansi Pemerintah untuk ketiga indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Efektivitas

Untuk mengukur indikator efektivitas dalam penelitian ini digunakan 2 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Efektivitas

No	**Pernyataan**		**Alternatif Jawaban**					**Skor**
			5	**4**	**3**	**2**	**1**	
1	Sumber daya yang digunakan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.	F	0	6	24	12	0	120
		%	0	14	57	29	0	100%
2	Pemerintah daerah dapat mencapai sasaran dari kinerja yang dijalankan.	F	0	7	27	8	0	125
		%	0	17	64	19	0	100%
Total		F	0	13	51	20	0	**245**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.25 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{245}{42x5x2}$x 100 % = 58,33%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator efektivitas berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 58,33%. Nilai yang diperoleh masuk kategori Baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Hasil perolehan data tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah kabupaten Ciamis telah melaksanakan kinerjanya dengan cukup baik dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cukup baik.

2. Pertumbuhan Karyawan

Untuk mengukur indikator pertumbuhan karyawan dalam penelitian ini digunakan 1 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pertumbuhan Karyawan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Secara periodik diadakan pelatihan/seminar untuk pegawai pemerintah.	F	0	7	24	11	0	122
		%	0	14	57	29	0	100%
2	Penempatan pegawai telah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.	F	0	4	23	14	1	114
		%	0	10	55	33	2	100%
Total		F	0	11	47	25	1	**236**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.26 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator pertumbuhan karyawan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{236}{42x5x2}$x 100 % = 56,19%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator pertumbuhan karyawan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 56,19%. Nilai yang diperoleh termasuk kategori cukup baik (berada pada interval 52,01-68,00%). Ini mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis cukup baik dalam rangka peningkatan kualitas karyawan dengan mengadakan pelatihan secara rutin.

3. Kepuasan Pelanggan

Untuk mengukur indikator kepuasan pelanggan dalam penelitian ini digunakan 1 item kuesioner. Hasil penilaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepuasan Pelanggan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Skor
			5	4	3	2	1	
1	Pemberian layanan jasa dengan tepat dan cepat.	F	0	3	16	20	3	122
		%	0	7	38	48	7	100%
2	Tersedianya fasilitas yang sesuai dan memadai untuk memenuhi kebutuhan	F	0	4	15	20	3	114
		%	0	10	36	48	7	100%

	masyarakat.							
Total		F	0	7	31	40	6	**207**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.27 di atas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator kepuasan pelanggan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$x 100 %

% Skor Tanggapan Responden = $\frac{207}{42x5x2}$x 100 % = 49,28%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator kepuasan pelanggan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 49,28%. Nilai yang diperoleh masuk kategori kurang baik (berada pada interval 36,01-52,00%). Hasil peroleh data tersebut mengandung pengertian bahwa masyarakat kabupaten Ciamis belum begitu puas terhadap kinerja yang di lakukan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Pemerintah daerah belum memberikan pelayanan jasa dengan cepat dan fasilitas yang tersedia juga belum cukup memadai bagi kepentingan masyarakat.

4.1.5 Analisis Verifikatif

Data yang digunakan masing-masing variabel dalam pernyataan kuesioner menggunakan pengukuran skala ordinal. Untuk memenuhi syarat, data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131). Hasil

perhitungan skor data variabel setelah di transformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Succesive Interval* (MSI) dapat dilihat dalam lampiran.

Berdasarkan dengan hipotesis penelitian yang diajukan, data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh *Good government governance* terhadap Pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Analisis jalur

Model struktural dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel bebas (independen) dan 1 variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Good government governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2), sedangkan variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) merupakan variabel terikat.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS Statistics Version 20.0* diperoleh koefisien jalur *good government governance* dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.27
Koefisien Jalur *Good governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.100	1.543		-2.009	.072
	good governance	.090	.039	.251	2.299	.044
	Akuntabilitas	.587	.083	.773	7.096	.000

a. Dependent *Variabel*: kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat nilai koefisien jalur dapat dilihat pada kolom *standardized coefficients* atau disebut koefisien beta. Koefisien jalur X_1 (*good government governance*) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang diperoleh (yx_1) adalah sebesar 0,251. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *good governance* memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, karena variabel *good governance* memiliki tingkat signifikansi <0,05%. Sedangkan nilai koefisien jalur yang diperoleh variabel akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), diperoleh (yx_2) sebesar 0,773 dengan signifikansi <0,05. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 77,3%.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji keterkaitan atau hubungan antara besarnya variabel *good governance* dan akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka digunakanlah berbagai metode statistika matematika antara lain metode Regresi Linier Berganda, metode Korelasi Berganda, dan metode Korelasi Determinasi.

Tabel 4.28
Koefisien Jalur *Good governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-3.100	1.543		-2.009	.072
	good governance	.090	.039	.251	2.299	.044
	Akuntabilitas	.587	.083	.773	7.096	.000

a. Dependent *Variabel*: kinerja instansi pemerintah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari analisis yaitu Y = 3,100 + 0,090 X_1 + 0,587 X_2 persamaan regresi tersebut bahwa harga $\propto_1$ = 0,090 bertanda positif dan harga $\propto_2$ = 0,587 bertanda positif. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara *good governance* (X1) dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dengan kata lain, dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,100 menyatakan bahwa besarnya Y adalah 3,100 dengan asumsi bahwa X1 dan X2 bernilai constant.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,090 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,090.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,587 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X2 akan meningkatkan Y yaitu sebesar 0,587.

3) Koefisien Korelasi

Dari data yang telah ditransformasikan menjadi skala interval dihitung skor total untuk setiap *variabel* X1 (*Good governance*), X2 (Akuntabilitas), Y (Kinerja Instansi Pemerintah) kemudian dihitung nilai korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment*. Nilai koefisien korelasi menunjukan seberapa besar keterkaitan hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 didapat koefisien korelasi variabel X1(*Good governance*), X2 (Akuntabilitas), Y (Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai berikut:

Tabel 4.29
Korelasi Antara Variabel

Correlations

		good governance	akuntabilitas	kinerja instansi pemerintah
good governance	Pearson Correlation	1	.737**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.004	.001
	Sum of Squares and Cross-products	402.769	112.385	91.846
	Covariance	33.564	9.365	7.654
	N	13	13	13
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.737**	1	.957**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000
	Sum of Squares and Cross-products	112.385	57.692	41.923
	Covariance	9.365	4.808	3.494
	N	13	13	13
kinerja instansi pemerintah	Pearson Correlation	**.794****	**.957****	**1**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	
	Sum of Squares and Cross-products	91.846	41.923	33.231
	Covariance	7.654	3.494	2.769
	N	13	13	13

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara *Good governance* dengan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,794. Jika diinterpretasikan korelasi *Good governance* dengan kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan dengan kategori cukup tinggi karena berkisar antara 0,61 – 0,80 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara

Good governance dengan kinerja instansi pemerintah. Jika pelaksanaan *good governance* baik maka kinerja instansi pemerintah daerahnya pun baik.

Koefisien korelasi antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,957. Keterkaitan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah termasuk dalam kategori korelasi tinggi karena berkisar antara 0,80 – 1 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Akuntabilitas dn Kinerja Instansi Pemerintah.

4) Uji Determinasi

1) Pengaruh *Good governance* (X_1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maksudnya terdiri dari beberapa variabel independen *Good governance* (X1) yang mempengaruhi variabel dependen Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Untuk hasil pengolahan data dengan spss diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.30
Korelasi Antara Variabel *Good governance* terhadap Kinerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819[a]	.671	.641	.996

a. Predictors: (Constant), *good governance*

Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,671 artinya variabel *good governance* (X1) mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,671 atau 67,1%. Dengan kata lain, pengaruh *good governance* (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 67,1%.

2) Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen Akuntabilitas (X2) yang mempengaruhi variabel dependen Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Untuk hasil pengolahan data dengan spss diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.31
Korelasi Antara Variabel Akuntabilitas terhadap Kinerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.957[a]	.917	.909	.502

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas

Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,917 artinya variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,917 atau 91,7%. Dengan kata lain, pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 91,7%.

3) Pengaruh Akuntabilitas (X2) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Maksudnya terdiri dari beberapa variabel independen (X1, X2) yang mempengaruhi variabel dependen (Y).

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary (hasil output olah data) **R^2** (*Adjusted R Square*). Nilai R^2 adalah sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti.

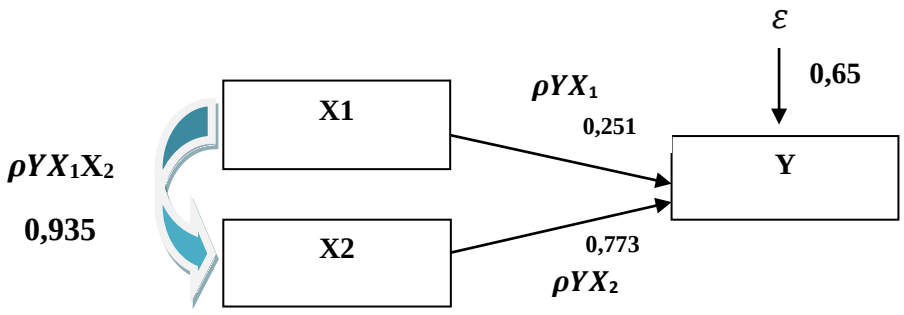
Tabel 4.32
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.972[a]	.946	.935	.425	.946	86.804	2	10	.000

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, *good governance*

Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,935 artinya variabel *good governance* (X_1) dan akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,946 atau 93,5%. Dengan kata lain, pengaruh X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 93,5%. Sedangkan sisanya 6,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya diluar X_1 dan X_2 terhadap Y.



Gambar 4.1
Diagram Dan Koefisien Jalur

4.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Nilai t hitung diperoleh dengan menggunakan bantuan aplikasi *SPSS for windows version 20.* Selanjutnya akan dibandingkan nilai t hitung dengan tingkat kesalahan (∝=5%) derajat kebebasan (df) = (n-k). kiteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika thitung < t_{tabeln}

Ha diterima jika thitung > t_{tabel}

Tabel 4.33
Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.100	1.543		-2.009	.072
	good governance	.090	.039	.251	2.299	.044
	Akuntabilitas	.587	.083	.773	7.096	.000

a. Dependent *Variabel*: kinerja instansi pemerintah

1) Uji t Variabel X_1

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X_1 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X_1 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0: diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Nilai statistik uji t untuk menguji hipotesis diatas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t = \frac{\rho_{zy}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{zy})}{n-2}}}$$

$$t \frac{0{,}972}{\sqrt{\frac{(1-0{,}946}{13-2}}}$$

$$t = 2{,}229$$

Terlihat pada hasil Uji Parsial tabel diatas diperoleh thitung untuk *variabel* X1 sebesar 7,133. Dengan derajat kebebasan (df) = n-2 = 70-2 = 68, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah : karena besarnya thitung 2,229> t tabel 2,201, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang bearti secara parsial (sendiri-sendiri) *good governance* (X_1) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

2) Uji t Variabel X_2

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X2 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X2 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Terlihat pada hasil Uji Parsial tabel diatas diperoleh thitung untuk variabel X_1 sebesar 7,096. Dengan derajat kebebasan (df) = n-2 = 13-2 = 11, dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah : karena besarnya thitung 7,096> t_{tabel} 2,201, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang bearti secara parsial

(sendiri-sendiri) Akuntabilitas (X_2) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.34
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.421	2	15.710	86.804	.000[b]
	Residual	1.810	10	.181		
	Total	33.231	12			

a. Dependent *Variabel*: kinerja instansi pemerintah

b. Predictors: (Constant), akuntabilitas, *good governance*

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Ha diterima jika $F_{hitung} > Ft_{tabel}$

Terlihat pada tabel diatas nilai f hitung sebesar 86.804. Pada taraf signifikansi5% (0,000 < 0,05) diperoleh Ftabel = 2,14. Nilai f_{hitung} > f tabel (86.804> 2,14), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance (*X_1) dan Akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Good government governance* terhadap Kinerja Akuntansi Pemerintah

Dalam penelitian Hermanson (2003), mengenai hubungan antara penerapan *Good government governance* dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa: Penerapan *Good government governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *Good government governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *Good government governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *Good government governance* merupakan suatu hal yang tepat.dalam suatu pemerintah.

Menurut Pratikno (2009:10), *Good governance* selain merujuk mekanisme pasar yang dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, *good governance* juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. *Good governance* sebagai *democratic politics* ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2006:11) "*good governance*" dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi *good governance* dengan variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,737. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel *good governance* dengan variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah searah. Dimana semakin tinggi *good governance*, maka akan diikuti pula

oleh semakin baiknya Kinerja Instansi Pemerintah. Tingkat keeratan korelasi 0,737 termasuk ke dalam kategori hubungan cukup tinggi karena berada pada interval 0.61 – 0, 80.

Koefisien jalur X1 (*good government governance*) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang diperoleh (yx_1) adalah sebesar 0,251. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *good governance* memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, karena variabel *good governance* memiliki tingkat signifikansi <0,05%.

Hasil dari koefisien determinasi berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,671 artinya variabel *good governance* (X_1) mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,671 atau 67,1%. Dengan kata lain, pengaruh *good governance* (X_1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 67,1%.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Suryo Patolo mengenai "Peran *Good government governance* Untuk Mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global". Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa prinsip –prinsip *Good governance* berpengaruh secara simultan dan parsial sebesar 69,826, dengan nilai sigifinsi sebesar 0,000.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Akuntansi Pemerintah

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Koefisien korelasi antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,957. Keterkaitan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah termasuk dalam kategori korelasi tinggi karena berkisar antara 0,80 – 1 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun hasil output SPSS 20 atas uji determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,917 artinya variabel Akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,917 atau 91,7%. Dengan kata lain, pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 91,7%.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nita Garnita yang telah meneliti mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan akuntabilitas mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 0,648. Dan akuntabilitas juga berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 42%.

4.2.3 Pengaruh *Good Government Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut PP No.101 tahun (2000) "Ciri-ciri untuk mewujudkan *good governance* yaitu: Profesionalitas, akutantabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat".

Kemudian dalam LAN & BPKP (2000) menyatakan bahwa: Proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menyediakan *Public Good and Sevices* di sebut *Governance* (pemerintah atau kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *Good governance* (kepemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan yaitu; Koordinasi (*aligment*) yang baik dan Integrasi, Profesionalisme serta Etos Kerja dan Moral yang tinggi. Mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan *komitmen* dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat). Sedangkan Wujud Kepemerintahan Yang Baik (*Good governance*) adalah Penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab dan efektif dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara domein domein Negara.

Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,935 artinya variabel *good governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang kuat dengan Y. Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,935 atau 93,5%. Dengan kata lain, pengaruh variabel *good governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 93,5%. Sedangkan sisanya 6,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya diluar X_1 dan X_2 terhadap Y.

Selanjutnya dari hasil uji regresi linier berganda didapatkan persamaan regresi ganda yang diperoleh dari analisis yaitu Y = 3,100 + 0,090 X_1 + 0,587 X_2 persamaan regresi tersebut bahwa harga $\propto_1$ = 0,090 bertanda positif dan harga $\propto_2$ = 0,587 bertanda positif.

Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara *good governance* (X_1) dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dengan kata lain, dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,100 menyatakan bahwa besarnya Y adalah 3,100 dengan asumsi bahwa X_1 dan X_2 bernilai constant.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,090 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X_1 akan meningkatkan Y sebesar 0,090.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,587 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X_2 akan meningkatkan Y yaitu sebesar 0,587.